

ABSTRAK

Muliati Fitri, NPM : 71180313008, Judul : Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang), Dibimbing Oleh : Heny Triastuti Kurnianingsih, S.E., M.Si. sebagai Pembimbng I, Sri Elviani, S.E., M.Si. sebagai Pembimbng II. Skripsi : 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis studi lapangan untuk mencari kebenaran mengenai permasalahan yang ada di desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, dan disesuaikan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 karena APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa Ujung Rambe kepada Bupati/Walikota melalui camat selama 7 hari. Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 penggunaan biaya tak terduga dimusyawarahkan atas perubahan anggaran. Proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 karena proses penatausahaannya tidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan, tetapi juga dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan. Sedangkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Desa Ujung Rambe

ABSTRACT

Muliati Fitri, NPM : 71180313008, Title : Analysis of Application of Village Financial Management Based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 (Case Study in Ujung Rambe Village, Bangun Purba District, Deli Serdang Regency), Supervised By : Heny Triastuti Kurnianingsih, S.E., M.Sc. as Supervisor I, Sri Elviani, S.E., M.Sc. as Supervisor II. Thesis : 2022.

This study aims to determine the implementation of financial management in the village of Ujung Rambe, Bangun Purba District, Deli Serdang Regency based on the Minister of Home Affairs Regulation number 20 of 2018.

The type of research used in this research is qualitative research using a descriptive approach. This research uses a type of field study to find out the truth about problems that exist in the village, especially in village financial management, and is adjusted to the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 related to village financial management.

The results showed that the village financial management planning process in Ujung Rambe Village was not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 because the village income and expenditure budget or APBDesa was submitted by the Ujung Rambe Village Head to the Regent/Mayor through the sub-district head for 7 days. The process of implementing village financial management in Ujung Rambe Village is not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 the use of unexpected costs is discussed on budget changes. The administrative process of village financial management in Ujung Rambe Village is not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 because the administrative process is not only carried out by the Head of Finance, but is also carried out by the Village Head, Village Secretary and Head of Government. Meanwhile, the reporting process and accountability for village financial management in Ujung Rambe Village is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018

Keywords : Village Financial Management, Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, Ujung Rambe Village